

**ANALISIS PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP DANA PIHAK
KETIGA (DPK) PADA BANK UMUM DAN BANK SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur
Untuk Menyusun Skripsi S-1
Jurusan Ilmu Ekonomi**



Diajukan Oleh :

AHMAD SAIFULLOH

0811010005/ FE/ IE

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”
JAWA TIMUR
2012**

KATA PENGANTAR

” Assalamu’alaikum, wr. wb”

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang peneliti susun dengan judul **“ANALISIS PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA BANK UMUM DAN BANK SYARIAH”** ini dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Peneliti menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini sering kali menghadapi hambatan dan keterbatasan dalam berbagai hal. Namun, tanpa bantuan, bimbingan, motivasi, saran dan dorongan yang telah diberikan berbagai pihak, peneliti tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana mestinya. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Ibu Dra. Ec. Titiek Nurhidayati selaku Dosen Pembimbing. Adapun rasa hormat dan ucapan terima kasih juga peneliti sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, MP, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan banyak bantuan berupa sarana fasilitas perijinan guna pelaksanaan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Dhani Ichsanuddin Nur, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Niniek Imaningsih, MP, selaku Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak-bapak dan ibu-ibu dosen serta staf karyawan khususnya Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” Jawa Timur yang telah dengan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuannya selama masa perkuliahan dan pelayanan akademik bagi peneliti.
5. Pimpinan beserta Staff Bank Indonesia cabang Surabaya.
6. Pimpinan beserta Staff BPS Jawa Timur.
7. Ayahanda, Ibunda, dan Adik yang telah memberikan motivasi, do’a, semangat dan dorongan moral serta spiritualnya yang telah tulus kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
8. Seluruh mahasiswa dari Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta semua pihak yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memotivasi, membantu, dan mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan dan memberikan balasan, limpahan rahmat, serta karunia-Nya, atas segala amal kebaikan serta bantuan yang telah diberikan.

Akhir kata, besar harapan bagi peneliti semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, baik sebagai bahan kajian maupun sebagai salah satu sumber informasi dan bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan.

Surabaya, Maret 2012

Ahmad Saifulloh

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAKSI.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....	6
2.2. Landasan Teori.....	10
2.2.1. Bank.....	10
2.2.1.1. Pengertian Bank.....	10
2.2.1.2. Fungsi Bank.....	11
2.2.1.3. Jenis-Jenis Bank.....	13

2.2.1.4. Total Aktiva Bank.....	17
2.2.2. Kesehatan Bank.....	17
2.2.2.1. Pengertian Kesehatan Bank	17
2.2.2.2. Aturan Kesehatan Bank.....	17
2.2.3. Pengertian Bank Umum.....	19
2.2.3.1. Fungsi dan Tugas Pokok Bank Umum.....	20
2.2.3.2. Dana Pihak Ketiga Bank Umum.....	21
2.2.4. Pengertian Bank Syariah	24
2.2.4.1. Dana Pihak Ketiga Bank Syariah.....	24
2.2.5. Sertifikat Bank Indonesia.....	28
2.2.5.1. Pengertian SBI.....	29
2.2.5.2. Tujuan Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia.....	30
2.2.5.3. Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia.....	30
2.2.5.4. Pengertian Suku Bunga.....	31
2.2.6. Inflasi.....	32
2.2.6.1. Pengertian Inflasi.....	32
2.2.6.2. Klasifikasi Inflasi.....	33
2.2.6.3. Akibat Inflasi.....	37
2.2.6.4. Cara Pengendalian Inflasi.....	38
2.2.7. Kurs Rupiah terhadap US \$.....	40
2.2.7.1. Pengertian Kurs Rupiah terhadap US \$.....	40
2.2.7.2. Sistem Kurs Valuta Asing.....	41
2.2.7.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan	

Nilai Tukar Mata Uang.....	45
2.2.7.4. Sistem Kurs yang Berubah-ubah.....	46
2.2.7.5. Sistem Kurs yang Stabil.....	47
2.2.7.6. Perubahan-Perubahan Kurs Valuta Asing.....	47
2.3. Kerangka Pikir.....	49
2.4. Hipotesis.....	54

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	55
3.2. Teknik Penentuan Data.....	55
3.3. Jenis Data dan Sumber Data.....	56
3.3.1. Jenis Data.....	57
3.3.2. Sumber Data.....	57
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	57
3.5. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis.....	58
3.5.1. Teknik Analisis.....	58
3.5.2. Uji Hipotesis.....	60
3.6. Uji Asumsi Klasik.....	64

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Obyek Penelitian.....	70
4.1.1. Gambaran Umum Perbankan Nasional.....	70
4.1.2. Perbankan Syariah.....	72

4.2. Deskripsi Hasil Penelitian.....	74
4.2.1. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum.....	75
4.2.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah.....	76
4.2.3. Perkembangan Tingkat Inflasi.....	77
4.2.4. Perkembangan Kurs Rupiah Terhadap US \$......	78
4.2.5. Perkembangan Suku Bunga SBI.....	79
4.3. Hasil Analisis Asumsi Regresi Klasik (BLUE / Best Linier Unbiased Estimate).....	80
4.3.1. Analisis Dan Pengujian Hipotesis.....	83
4.3.2. Uji Hipotesis Secara Parsial.....	85
4.3.3. Pembahasan.....	87
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	89
5.2. Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Kurva Demand Pull Inflation.....	35
Gambar 2 : Kurva Cosh push Inflation.....	36
Gambar 3 : Penentuan Nilai Tukar Dalam Sistem Kurs Tetap.....	43
Gambar 4 : Penentuan Nilai Tukar Dalam Sistem Kurs Mengambang.....	44
Gambar 5 : Kerangka Pikir.....	53
Gambar 6 : Kurva Distribusi Penolakan / Penerimaan Hipotesis Secara Simultan.....	62
Gambar 7 : Kurva Distribusi Penolakan / Penerimaan Hipotesis Secara parsial.....	63
Gambar 8 : Kurva Durbin-Watson.....	66
Gambar 9 : Kurva Statistik Durbin-Watson.....	81

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Autokorelasi Durbin Watson.....	67
Tabel 2 : Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum Tahun 2006 – 2008.....	75
Tabel 3 : Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Syariah Tahun 2006 – 2008.....	76
Tabel 4 : Perkembangan Tingkat Inflasi Tahun 2006 – 2008.....	77
Tabel 5 : Perkembangan Kurs Rupiah Terhadap US \$ Tahun 2006 – 2008.....	78
Tabel 6 : Perkembangan Suku Bunga SBI Tahun 2006 – 2008.....	79
Tabel 7 : Tes Autokorelasi.....	81
Tabel 8 : Tes Multikolinier.....	82
Tabel 9 : Tes Heterokedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman.....	83
Tabel 10 : Analisis Varian (Anova).....	85
Tabel 11 : Hasil Analisis Variabel Tingkat Inflasi (X1), Kurs Valas (X2), dan Suku Bunga SBI (X3), Dana Pihak Ketiga Bank Umum (Y1), dan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah (Y2).....	86
Tabel 12 : Hasil Koefisien Variabel Independen.....	86

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Input Indonesia

Lampiran 2 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Untuk Y_1 (Variables Entered / Removed, Model Summary, dan ANOVA)

Lampiran 3 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda (Coefficients, Collinearity Diagnostics)

Lampiran 4 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda (Residuals Statistics, Correlations)

Lampiran 5 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Untuk Y_2 (Variables Entered / Removed, Model Summary, dan ANOVA)

Lampiran 6 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda (Coefficients, Collinearity Diagnostics)

Lampiran 7 : Hasil Analisis Regresi Linier Berganda (Residuals Statistics, Correlations)

Lampiran 8 : Tabel Uji F

Lampiran 9 : Tabel Uji t

Lampiran 10 : Tabel Durbin-Watson

ANALISIS PENGARUH MAKRO EKONOMI TERHADAP DANA PIHAK KETIGA (DPK) PADA BANK UMUM DAN BANK SYARIAH

Oleh :

Ahmad Saifulloh

ABSTRAKSI

Keberadaan bank (konvensional dan syariah) secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun, pengaruh kondisi perekonomian di Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun variabel moneter yang perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki andil dalam penyerapan dana masyarakat yang dilakukan oleh perbankan.

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Bank Indonesia cabang Surabaya selama 3 tahun mulai 2006 – 2008 dalam periode triwulan. Data yang dianalisis menggunakan model Regresi Linier berganda yaitu suatu analisis untuk mengetahui masing-masing dari variabel bebas (X) yang terdiri dari variabel Inflasi, Kurs Rupiah terhadap US \$, dan Suku Bunga SBI terhadap variabel terikat (Y) yaitu Dana Pihak Ketiga Bank Umum (Y_1) dan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah (Y_2).

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis secara simultan variabel bebas, yaitu Inflasi (X_1), Kurs Rp terhadap US \$ (X_2), dan Suku bunga SBI (X_3) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum (Y_1) dan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah (Y_2). Untuk pengujian hipotesis secara parsial, berdasarkan hasil analisis variabel yang berpengaruh secara signifikan adalah Kurs Rp terhadap US \$ (X_2) dan Suku Bunga SBI (X_3) terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank umum. Sedangkan yang berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Pihak Ketiga pada Bank syariah adalah Kurs Rp terhadap US \$ (X_2), dan Suku bunga SBI (X_3).

Kata Kunci : DPK Bank Umum, DPK Bank Syariah, Inflasi, Kurs Rp terhadap US \$, Suku bunga SBI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bank sebagai lembaga keuangan adalah bagian dari faktor penggerak kegiatan perekonomian. Kegiatan-kegiatan lembaga sebagai penyedia dan penyalur dana akan menentukan baik tidaknya perekonomian suatu negara. Dalam perkembangannya, jasa perbankan telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pesaing-pesaing baru telah memasuki pasar dengan berbagai tawaran produk yang beraneka ragam dan memiliki daya tarik tersendiri. **(Siamat, 2004 : 87)**

Pertumbuhan dan perkembangan bank, baik bank konvensional maupun bank syariah bisa dilihat dari semakin banyaknya jaringan kantor, aset, banyaknya produk-produk yang ditawarkan, dan banyaknya Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun dari masyarakat. **(Winda, 2009 : 10)**

Berdasarkan **Laporan Evaluasi Kebijakan dan Perkembangan Perbankan, (2002 : 12)** total asset perbankan tumbuh sebesar 0.7% atau meningkat dari Rp1.087,9 triliun pada triwulan III-2002 menjadi Rp1.095,8 triliun. Sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada triwulan IV-2002, DPK meningkat sebesar Rp0,4 triliun (0,1%) menjadi Rp815,4 triliun. DPK meningkat sebesar Rp1,2 triliun (0,1%).

Menurut hasil penelitian yang berjudul "*Islamic and Conventional Banking in the nineties*", tercatat bahwa perkembangan Bank Islam selama tahun 1990-1998 sangat mengesankan karena performancenya yang baik. Hal ini terlihat dengan semakin naiknya rasio terhadap *total assets* dan *equity* yang merupakan variabel terpenting untuk mengukur kekuatan perusahaan. Menurut hasil studi tersebut terbukti Bank Islam lebih efektif dalam menggunakan dan mengalokasikan dananya. (Iqbal, 2001 : 52)

Perkembangan Bank Umum Syariah menurut kajian **Evaluasi Kebijakan dan Perkembangan Perbankan, (2002 : 12)** aset perbankan syariah tumbuh sebesar 12,7% hingga mencapai posisi Rp4,1 triliun. Sedangkan untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 18,2% menjadi Rp2,9 triliun. Pertumbuhan DPK perbankan Syariah terutama bersumber dari naiknya deposito mudharabah sejumlah Rp398,6 miliar (29,3%). Perbankan syariah berhasil membukukan laba bersih tahun berjalan pada triwulan IV-2002 berjumlah Rp52,5 miliar.

Perkembangan peran perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan di Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah juga diatur dalam Undang-undang No. 10 tahun 1998 dimana Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peran bank syariah dalam memacu pertumbuhan perekonomian daerah semakin strategis dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian yang semakin berimbang. Dukungan terhadap pengembangan

perbankan syariah juga diperlihatkan dengan adanya “*dualbanking system*”, dimana bank konvensional diperkenankan untuk membuka unit usaha syariah. **(Rivai, 2006 : 2)**

Keberadaan bank (konvensional dan syariah) secara umum memiliki fungsi strategis sebagai lembaga intermediasi dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Namun karakteristik dari kedua tipe bank (konvensional dan syariah) dapat mempengaruhi perilaku calon nasabah dalam menentukan preferensi mereka terhadap pemilihan antara kedua tipe bank tersebut. Selain itu, pengaruh kondisi perekonomian di Indonesia baik variabel ekonomi makro maupun variabel moneter yang perkembangannya dapat dikendalikan oleh bank sentral juga memiliki andil dalam penyerapan dana masyarakat yang dilakukan oleh perbankan. Variabel-variabel tersebut dapat berupa tingkat inflasi, suku bunga (interest rate), dan nilai tukar rupiah. **(Iswardono, 2004 : 155)**

Atas dasar uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengamati masalah penghimpunan dana dari masyarakat pada bank umum dan bank syariah, dan mengkaji lebih dalam lagi tentang ”Analisis Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum dan Bank Syariah”.

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah tingkat inflasi,kurs Rupiah terhadap US \$, dan tingkat suku bunga SBI mempunyai pengaruh yang nyata terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK) pada bank umum dan bank syariah ?
2. Manakah dari ketiga faktor makro ekonomi tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK) pada bank umum dan bank syariah ?

1.3 Tujuan penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah di kemukakan di atas,tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tingkat inflasi,kurs Rupiah terhadap US \$, dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK) pada bank umum dan bank syariah.
2. Untuk mengetahui dan membandingkan manakah diantara faktor-faktor makro ekonomi yang paling dominan dan berpengaruh terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK) pada bank umum dan bank syariah.

1.4 Manfaat penelitian

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah di kemukakan diatas, maka manfaat yang hendak di capai sehubungan dengan penelitian adalah:

1. Bagi perbankan

Sebagai sumber informasi kepada lembaga-lembaga terkait tentang perbandingan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank umum dan bank syariah.

2. Bagi universitas

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur guna melengkapi perbendaharaan perpustakaan.

3. Bagi mahasiswa

Sebagai masukan dan informasi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan masalah moneter dan penghimpunan dana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Bagian ini berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan masalah perbankan dan pernah disampaikan oleh beberapa peneliti terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. **(Wahyuningsih, 2002 : 9)** dengan judul penelitian “Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Penghimpunan Dana Tabungan Oleh Perbankan di Surabaya” dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan, bahwa penghimpunan dana tabungan oleh perbankan di Surabaya secara simultan dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat (X_1), tingkat bunga (X_2), dan tingkat inflasi (X_3). Sedangkan secara parsial hanya pendapatan masyarakat saja yang berpengaruh terhadap tabungan masyarakat (Y), hal ini ditunjukkan dengan perhitungan $t_{hitung} = -1,6027 < t_{tabel} = 2,306$ untuk tingkat bunga.
2. **(Rustianan, 2000 : 8)** dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Usaha Penghimpunan Deposito Berjangka pada Bank Umum di Indonesia” menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara pendapatan perkapita (X_1), dan suku bunga (X_2) sebagai variable bebas baik secara simultan maupun secara parsial, sedangkan tingkat

inflasi (X_3), tidak terdapat pengaruh yang nyata secara parsial tetapi berpengaruh yang nyata secara simultan terhadap usaha penghimpunan deposito berjangka pada bank umum di Indonesia (Y). Sedangkan secara parsial pendapatan perkapita dan suku bunga berpengaruh nyata terhadap tabungan masyarakat yang ditunjukkan dengan $t_{hitung} = 3,089 > t_{tabel} = 2,447$ untuk pendapatan perkapita, dan $t_{hitung} = 2,251 > t_{tabel} = 2,447$ untuk suku bunga. Sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh secara nyata terhadap tabungan dimana $t_{hitung} = 2,251 < t_{tabel} = 2,447$.

3. **(Haron dan Ahmad, 2000)** dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Tabungan Pada Bank Syariah”. Selain bertujuan untuk melihat hubungan yang terjadi antara simpanan yang ada di bank syariah dan tingkat keuntungannya, juga untuk meneliti apakah tingkat bunga bank konvensional mempunyai hubungan langsung dengan simpanan yang ada di bank syariah. Penelitian ini menggunakan Adaptive Expectation Model. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa hubungan antara tingkat bagi hasil di bank syariah dengan total jumlah simpanannya adalah positif, karena dengan terjadinya peningkatan pada tingkat keuntungan di bank syariah akan mendorong peningkatan total simpanannya. Hubungan antara tingkat suku bunga di bank konvensional dengan simpanan di bank syariah adalah hubungan negatif, artinya bila terjadi kenaikan pada suku bunga, maka simpanan di bank syariah akan menurun. Kesimpulan akhir dari penelitian tersebut adalah bahwa motivasi

mencari untung adalah faktor utama yang mendorong nasabah untuk menabung di bank syariah.

4. **(Ghafur, 2003)** dengan judul penelitian “Pengaruh dari Tingkat Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia (BMI), Tingkat Suku Bunga Bank Konvensional, dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Volume Simpanan Mudharabah di BMI”. Hasil estimasi dengan menggunakan Autoregressive Distributed Lag (ADL) menunjukkan bahwa dari ketiga variabel bebas, hanya variabel pendapatan (GDP) yang berpengaruh signifikan dan positif terhadap simpanan mudharabah. Sedangkan variabel tingkat bagi hasil dan tingkat suku bunga tidak berpengaruh secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa pola menabung masyarakat di BMI dalam jangka pendek masih sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Akan tetapi dalam jangka panjang variabel GDP berpengaruh negatif terhadap simpanan mudharabah. Hal ini bisa terjadi mungkin karena masyarakat lebih memilih untuk menabung di tempat lain atau berinvestasi di tempat lain atau berinvestasi dalam bentuk lain ketika penghasilannya meningkat. Variabel tingkat bagi hasil yang tidak signifikan berpengaruh terhadap volume simpanan mudharabah di BMI menunjukkan bahwa kehendak masyarakat menabung di BMI bukan dipengaruhi motif untuk mendapatkan return berupa bagi hasil. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya bagi hasil yang diberikan tidak berpengaruh terhadap kehendak masyarakat untuk menabung. Demikian pula perubahan-perubahan yang terjadi pada tingkat suku bunga di bank konvensional juga tidak

mempengaruhi simpanan mudharabah di BMI. Ada faktor-faktor lain yang tidak bisa ditemukan di sini yang mempengaruhi masyarakat untuk menabung di BMI.

5. **(Rudy, 2004 : 135)** dengan judul “Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penghimpunan Dana Masyarakat pada Bank Syariah di Indonesia”. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara simultan (uji F) diperoleh bahwa Tingkat Bagi Hasil (X_1), Tingkat Suku Bunga (X_2) dan Jumlah Kantor Bank (X_3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Jumlah Dana Yang Dihimpun Bank Syariah di Indonesia(Y) dengan $F_{hitung} = 60,790 > F_{tabel} = 3,29$. Sedangkan hasil analisis secara parsial Tingkat Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Jumlah Dana Yang Dihimpun Bank Syariah di Indonesia dengan $T_{hitung} = 2,131$. Untuk tingkat suku Bunga tidak berpengaruh terhadap Jumlah Dana Yang Dihimpun Bank Syariah di Indonesia dengan $T_{hitung} = -0,887 < T_{tabel} = 2,131$. Sedangkan Jumlah Kantor Bank berpengaruh positif terhadap Jumlah Dana Yang Dihimpun Bank Syariah di Indonesia dengan $T_{hitung} = 2,235 > T_{tabel} = 2,131$
6. **(Irbid dan Zarka, Penelitian 2001)** dengan judul penelitian “Faktor-faktor yang Mendorong Nasabah Memilih Bank Syariah”. Hasil penelitian tersebut mendukung bahwa motivasi nasabah dalam memilih bank syariah cenderung didasarkan kepada motif keuntungan, bukan kepada motif keagamaan. Dengan kata lain, nasabah lebih mengutamakan *economic rationale* dalam keputusan memilih bank syariah dibandingkan dengan lembaga perbankan non-syariah atau bank konvensional.

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, maka terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang dilakukan. Perbedaannya adalah terletak pada variable-variabel yang digunakan antara lain : pendapatan per kapita, suku bunga, dan inflasi yang akan dilihat pengaruhnya terhadap tabungan dan deposito berjangka pada bank umum, dan tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga bank umum, dan pendapatan masyarakat yang dilihat pengaruhnya terhadap volume simpanan mudharabah pada bank syariah. Sedangkan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini melihat dari segi makro ekonomi, yaitu : inflasi, kurs valas, dan suku bunga SBI. Dimana variabel-variabel tersebut digunakan untuk meneliti bagaimana pengaruhnya terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Bank Umum dan Bank Syariah.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Bank

2.2.1.1 Pengertian Bank

Pengertian Bank pada awal dikenalnya adalah meja tempat menukar uang. Lalu pengertian berkembang menjadi tempat penyimpanan uang dan seterusnya. Namun semakin modernnya perkembangan dunia perbankan, maka pengertian bank pun berubah pula. “Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya”. (**Kasmir, 2004 : 8**)

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*), yang menyalurkan dana dari pihak yang berlebihan dana (*idle fund/ surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan”. (**Dendawijaya, 2003 :25**)

Pengertian Bank menurut pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Jadi pengertian Bank adalah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana itu kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit serta kegiatan jasa-jasa keuangan lainnya.

2.2.1.2 Fungsi Bank

Bank yang bertindak sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi sebagai penghubung antara pihak yang memiliki dana dengan pihak

yang membutuhkan dana. Tetapi pada dasarnya bank memiliki tiga fungsi sebagai berikut :

1. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat menyimpan uang atau berinvestasi bagi masyarakat. Bank memberikan surat atau selembaar kertas dalam bentuk:
 - a. Giro (*Demand Deposito*)
 - b. Deposito Berjangka(*Time Deposito*)
 - c. Tabungan (*Saving Deposit*)
2. Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkan.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*kliring*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar negeri (*inkaso*), *Letter of Credit (LC)*, *Safe Deposit Box*, *Bank Garansi*, *Bank Notes*, *Trevellers Cheque* dan jasa lain.

Dengan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa bank mempunyai fungsi yang sangat luas dalam suatu Perekonomian Negara, karena bank merupakan alat untuk menjaga kestabilan moneter dan keuangan. Bank mempunyai fungsi utama dalam menghimpun dana dan

menyalurkan dana kepada masyarakat, dalam hal ini bank berperan juga dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. (Kasmir, 2004 : 9)

2.2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Di Indonesia saat ini terdapat berbagai jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang- Undang Perbankan. Penggolongan jenis-jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, segi kepemilikannya status dan cara menentukan harga.

Adapun jenis perbankan dewasa ini jika ditinjau dari berbagai segi, antara lain: (Kasmir, 2004 : 18)

1. Dilihat dari segi fungsinya

Menurut Undang- Undang Pokok perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan berdasarkan fungsinya terdiri dari: (Kasmir, 2004 : 18-20)

a. Bank Umum

Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatan BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, jasa-jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2. Dilihat dari segi kepemilikan

Jenis Bank berdasarkan kepemilikan ini dapat dilihat dari Akte Pendirian dan Penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah **(Kasmir, 2004 : 20-22)**

a. Bank Milik Pemerintah (BUMN)

Bank yang Akte Pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia , sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh : BNI 46, BRI, BTN, Bank Mandiri

b. Bank Milik Swasta Nasional

Bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Akte pendirian bank ini juga dimiliki oleh pihak swasta nasional.

Contoh : BCA, Bank Danamon, Bank Mega, Muamalat, Bank Niaga, Lippo Bank, Bank Permata.

c. Bank Milik Koperasi

Bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum Koperasi.

Contoh : Bank Bukopin

d. Bank Milik Asing

Bank yang kepemilikan sahamnya 100% oleh pihak asing (luar negeri) di Indonesia.

Contoh : *ABN Amro Bank, American Express Bank, City Bank, Hongkong bank, Standard Chartered Bank*

e. Bank Milik Campuran

Bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional

Contoh : *Inter Pacific Bank, Mitsubishi Buana Bank*

3. Dilihat dari segi status

Jenis ini dilihat dari segi kemampuannya untuk melayani masyarakat, terbagi menjadi : **(Kasmir, 2004 :22-23)**

a. Bank Devisa

Bank yang dapat melakukan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

Contoh : *Transfer ke luar negeri, Traveller Cheque*, Pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit*

b. Bank Non Devisa

Bank ini mempunyai fungsi yang berkebalikan dengan bank devisa. Bank ini melakukan transfer masih dalam batas-batas Negara (dalam negeri)

4. Dilihat dari segi cara menentukan harga

Di Indonesia mulanya hanya ada satu kelompok, namun hadirnya bank Syariah sejak tahun 1990, jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga, terbagi dalam 2 kelompok : **(Kasmir, 2004 : 23-25)**

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Kredit juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
 - Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan bunga ini dikenal dengan istilah *fee based*.
- b. Bank yang berdasarkan prinsip Syariah Islam

Bank berdasarkan prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasar Prinsip Syariah juga sesuai dengan Syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank Prinsip Syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan Sunah Rasul. Bank berdasarkan Prinsip Syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan Prinsip Syariah bunga adalah riba.

2.2.1.4 Total Aktiva Bank

Asset atau aktiva menggambarkan pola pengalokasian dana bank. **(Dendawijaya, 2003 : 110)** Total aktiva bank umum adalah jumlah semua aktiva yang dimiliki oleh bank umum pemerintah dan bank umum swasta nasional. **(Boediono, 2001 : 119)**

2.2.2 Kesehatan Bank

2.2.2.1 Pengertian Kesehatan Bank

Kesehatan suatu bank dapat diartikan sebagai kemampuan suatu bank untuk melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan mampu memenuhi semua kewajibannya dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku. Pengertian tentang kesehatan bank diatas merupakan suatu batasan yang sangat luas, karena kesehatan bank memang mencakup kesehatan suatu bank untuk melakukan seluruh kegiatan usaha perbankannya. **(Sri, dkk, 2000 : 22)**

2.2.2.2 Aturan Kesehatan Bank

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. UU tersebut lebih lanjut menetapkan bahwa : **(Sri, dkk, 2000 : 22-23)**

- a. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank wajib menempuh cara-cara Bank dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya kepada Bank.
- c. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan, dan penjelasan mengenai usahanya menurut cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bank atas permintaan Bank Indonesia, wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksa buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
- e. Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan Akuntan Publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap Bank.

- f. Bank wajib menyampaikan kepada bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan tersebut wajib terlebih dahulu di audit oleh akuntan publik.
- g. Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba/rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Menyadari arti pentingnya kesehatan suatu bank bagi pembentukan kepercayaan dalam dunia perbankan serta untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dalam dunia perbankan, maka Bank Indonesia merasa perlu menerapkan aturan tentang kesehatan bank. Dengan adanya aturan tentang kesehatan bank ini, perbankan diharapkan selalu dalam kondisi sehat, sehingga bank tidak akan merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan. Bank yang beroperasi dan berhubungan dengan masyarakat diharapkan hanya bank-bank yang betul-betul sehat. Aturan tentang kesehatan bank yang diterapkan oleh Bank Indonesia mencakup berbagai aspek dalam kegiatan bank, mulai dari penghimpunan dana, sampai dengan penggunaan dan penyaluran dana.

2.2.3 Pengertian Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, di mana dalam pelaksanaan kegiatan usahanya dapat secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Sebagai mana halnya fungsi dan tugas perbankan Indonesia. **(Hasibun, 2002 : 36)**

Bank umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. **(Siamat, 2004 : 88)**

Bank Umum dalam usahanya bertindak sebagai pengumpul dana dalam bentuk simpanan, baik giro, tabungan maupun deposito. Bank Umum ini dapat diselenggarakan atau dimiliki pemerintah, swasta nasional, koperasi atau asing. **(Dendawijaya, 2003 : 89)**

Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Bank Umum adalah bank yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. **(Iswardono, 2004 : 121)**

2.2.3.1. Fungsi dan Tugas Pokok Bank Umum

Fungsi dan Tugas Pokok Bank Umum adalah :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.

3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
5. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.

(Hasibun, 2002 : 36)

1.2.3.1. Dana Pihak Ketiga Bank Umum

Sumber utama dana bank berasal dari simpanan dalam bentuk giro (*demand deposit*), deposito berjangka (*time deposit*), dan tabungan (*saving deposit*). Ketiga jenis dana ini sering disebut sebagai sumber dana tradisional bank. Sumber-sumber dana bank dalam bentuk simpanan tersebut dapat berasal dari masyarakat maupun dari nasabah institusi. Disamping itu sumber dana bank dapat pula berasal dari modal dan sumber lainnya yang tidak termasuk dari kedua sumber tersebut di atas.

1. Simpanan Giro

Giro atau *demand deposit* sering juga disebut *checking account* adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan

penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan (bilyet giro).

Setiap pemilik rekening giro (giran) diberikan buku cek dan bilyet giro sebagai instrumen untuk melakukan penarikan dana atau pembayaran suatu transaksi. Cek dapat digunakan untuk suatu pembayaran transaksi secara tunai, cek dapat di tarik atas unjuk atau atas nama dan tidak dapat dibatalkan oleh penarik kecuali cek tersebut dinyatakan hilang ataupun di curi dengan dibuktikan oleh laporan hilang dari kepolisian. Sedangkan bilyet giro pada dasarnya merupakan perintah kepada bank untuk memindah bukuan sejumlah tertentu uang atas beban rekening penarik pada tanggal yang ditentukan kepada pihak yang tercantum dalam warkat bilyet giro tersebut. (Siamat, 2004 : 116)

Perhitungan Bunga Giro

- Perhitungan dengan menggunakan saldo terendah

$$= \frac{\text{Bunga (\%)} \times \text{Saldo terendah}}{12 \text{ Bulan}}$$

- Perhitungan dengan menggunakan saldo rata-rata

$$= \frac{\text{Saldo rata - rata} \times \text{Hari} \times \text{Suku Bunga}}{360 \text{ Hari}}$$

(Siamat, 2004 : 117-118)

2. Simpanan Tabungan

Tabungan (*savings deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu. (Siamat, 2004 : 119)

Perhitungan Bunga Tabungan

- Perhitungan dengan saldo terendah

$$= \frac{\text{Bunga} \times \text{Saldo terendah}}{12 \text{ Bulan}}$$

- Perhitungan dengan saldo harian

$$= \frac{\text{Bunga} \times \text{Saldo harian}}{360 \text{ Hari}}$$

(Siamat, 2004 : 119)

3. Simpanan Deposito Berjangka

Deposito berjangka (*time deposit*) adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank. Sumber dana ini memiliki ciri-ciri pokok yaitu jangka waktu penarikannya tetap, oleh karena

itu sering disebut fixed deposit umumnya memiliki jangka waktu jatuh tempo 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Deposito berjangka ini hanya dapat ditarik atau diuangkan pada saat jatuh temponya oleh pihak yang namanya tercantum dalam bilyet deposit. Oleh karena itu, deposito berjangka merupakan simpanan atas nama. **(Siamat, 2004 : 118)**

2.2.4 Pengertian Bank Syariah

Istilah yang digunakan untuk sebutan bank Islam adalah Bank Syariah. Secara akademik, istilah Islam dan Syariah memang mempunyai pengertian yang berbeda. Namun, secara teknis untuk penyebutan Bank Islam dan Bank Syariah mempunyai pengertian yang sama.

Menurut ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. **(Sumitro, 2002 : 5)**

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip Syariah Islam. **(Manurung, 2004 : 223)**

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti Bank yang tata cara pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariat Islam

yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadist.
(Sumitro, 2002 : 5)

2.2.4.1 Dana Pihak Ketiga Bank Syariah

Dalam pandangan syariah, uang bukanlah suatu komoditi melainkan hanya sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis. Hal ini bertentangan dengan perbankan yang berbasis bunga, dimana “uang mengembangbiakkan uang”, tidak peduli apakah uang itu untuk kegiatan produktif atau tidak. Untuk menghasilkan keuntungan, uang harus dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar, baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industri manufaktur, sewa menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu usaha tersebut.
(Muhammad, 2004 : 232)

Prinsip operasional syariah yang diterapkan secara luas dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah*. Dengan demikian penamaan jenis penghimpunan dana pada bank syariah disesuaikan dengan prinsip yang melandasimya.
(Siamat, 2004 : 190)

Prinsip Wadi'ah

Titipan (*Wadi'ah*) simpanan yang dijamin keamanan dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.

Dalam kegiatan penghimpunan dana masyarakat di bank syariah prinsip *wadi'ah* dapat diterapkan pada rekening giro dan tabungan. Dengan demikian terdapat 2 (dua) jenis penghimpunan dana berdasarkan prinsip *wadi'ah*, yaitu Giro *Wadi'ah* dan Tabungan *Wadi'ah*.

Prinsip *Wadi'ah* yang berlaku baik untuk giro maupun tabungan, yaitu :

- a. Prinsip *Wadi'ah yad dhamanah*, yang berarti bank dapat memanfaatkan dan menyalurkan dana yang disimpan serta menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.
- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak memperoleh imbalan atau menanggung kerugian. Manfaat yang diperoleh pemilik dana adalah jaminan keamanan terhadap simpanannya serta fasilitas-fasilitas giro dan tabungan lainnya.
- c. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan biaya administrasi. Untuk menjauhkan diri dari riba, maka biaya administrasi :

1. Harus dinyatakan dengan nominal, bukan prosentase

2. Harus nyata, jelas dan pasti serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan terjadinya akad.
- e. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Prinsip Mudharabah

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana, prinsip Mudharabah terbagi dua yaitu, Mudharabah Mutlaqah dan *Mudharabah Muqayyadah*.

a. *Mudharabah mutlaqah*

Dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah prinsip mudharabah mutlaqah dapat diterapkan untuk pembukaan rekening tabungan dan deposito sehingga terdapat 2 (dua) jenis penghimpunan dana berdasarkan prinsip ini yaitu : Tabungan *Mudharabah* dan Deposito *Mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Prinsip *mudharabah* berikut ini berlaku baik untuk tabungan maupun deposito :

1. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dana/atau perhitungan pembagian keuntungan serta risiko yang dapat timbul dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
2. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan/atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
3. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.
4. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. *Mudharabah muqayyamah*

Jenis ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dan bank menetapkan syarat penyaluran dana. Untuk itu wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
2. Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening simpanan khusus dengan dana dari rekening lainnya.
3. Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.

(Siamat, 2004 : 190-191)

2.2.5 Sertifikat Bank Indonesia

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral, salah satu fungsi Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter adalah membantu pemerintah dalam mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Dalam melaksanakan tugasnya, BI menggunakan beberapa piranti moneter yang terdiri dari Giro Wajib Minimum (*Reserve Requirement*), fasilitas diskonto, Himbauan moral, dan Operasi Pasar Terbuka BI dapat melakukan transaksi jual beli surat berharga termasuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). **(Manurung, 2004 : 112)**

2.2.5.1 Pengertian SBI

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No.8/13/DPM tentang penerbitan Sertifikat Bank Indonesia melalui lelang, Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SBI adalah surat berharga dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. **(Manurung, 2004 : 112)**

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan dalam sistem diskonto oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka pendek yang dinyatakan dalam satuan prosentase. **(Rivai, 2006 : 26)**

Sertifikat Bank Indonesia merupakan surat berharga yang dapat diperjualbelikan dan dapat dijadikan likuiditas sekunder. **(Iqbal, 2001 : 23)**

Dapat disimpulkan bahwa SBI adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan hutang berjangka pendek. **(Siamat, 2004 : 8)**

2.2.5.2 Tujuan Penerbitan Sertifikat Bank Indonesia

Sebagai Otoritas Moneter, BI berkewajiban memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam paradigma yang dianut, jumlah uang primer (uang kartal+uang giral di BI) yang berlebihan dapat mengurangi kestabilan

nilai Rupiah. SBI diterbitkan dan dijual oleh BI untuk mengurangi kelebihan uang primer tersebut. (Manurung, 2004 : 113)

2.2.5.3 Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia

SBI memiliki karakteristik sebagai berikut : (www.bi.go.id)

1. Jangka waktu maksimum 12 bulan dan sementara waktu hanya diterbitkan untuk jangka waktu 1 dan 3 bulan.
2. Denominasi : dari yang terendah Rp50 Juta sampai dengan tertinggi Rp100 Miliar.
3. Pembelian SBI oleh masyarakat minimal Rp100 Juta dan selebihnya dengan kelipatan Rp50 Juta.
4. Pembelian SBI didasarkan pada nilai tunai berdasarkan diskonto murni (*true discount*) yang diperoleh dari rumusan berikut ini :

$$\text{Nilai Tunai} = \frac{\text{Nilai Nominal} \times 360}{360 + \{(\text{Tingkat Diskonto} \times \text{Jangka Waktu})\}}$$

2.2.5.4 Pengertian Suku Bunga

Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Ia mempengaruhi secara langsung kehidupan masyarakat keseharian dan mempunyai dampak penting terhadap kesehatan perekonomian. Jadi, suku bunga adalah harga dari meminjam uang untuk menggunakan daya belinya. **(Puspoprano, 2004 : 70)**

Suku bunga adalah harga yang dibebankan oleh unit ekonomi yang mengalami surplus (unit surplus) pada unit ekonomi yang mengalami defisit (unit defisit) atas pinjaman yang diberikan dari tabungannya. Suku bunga adalah harga yang dibayar “peminjam” (debitur) kepada ”pihak yang meminjamkan” (kreditur) untuk pemakaian sumber dana seluruh interval waktu tertentu. Jumlah pinjaman yang diberikan disebut *principal*, dan harga yang dibayar biasanya diekspresikan sebagai persentase dari *principal* perunit waktu (umumnya pertahun). **(Fabozzi, dkk, 2003 : 204)**

Tingkat bunga adalah harga dari penggunaan uang atau dana untuk jangka waktu tertentu atau biasanya juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat bunga sebagai harga biasanya juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah di masa yang akan datang dengan demikian tingkat suku bunga berkaitan sekali dengan kurun waktu di dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. **(Kasmir, 2003 : 39)**

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suku bunga adalah tingkat balas jasa yang diperoleh oleh masyarakat atas sejumlah dana atau pinjaman yang telah diterima selama jangka waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase (%).

Dilihat dari sisi nasabah yang paling menarik dari deposito adalah tingkat bunganya. Karena deposito merupakan simpanan yang memberikan bunga tertinggi dibanding jenis simpanan yang lainnya seperti tabungan dan giro. Sedangkan perbankan memandang bahwa produk deposito merupakan produk yang dapat memberikan keleluasaan bagi bank untuk dapat mengoptimalkan investasi dananya dalam berbagai kegiatan. Seperti kredit dan surat-surat berharga.

2.2.6 Inflasi

2.2.6.1. Pengertian Inflasi

Beberapa pengertian mengenai inflasi adalah sebagai berikut :

1. Pengertian singkat dari inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus-menerus. **(Boediono, 2001: 155)**
Yang dimaksud dengan inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus-menerus selama satu periode tertentu. **(Nopirin, 2000 : 25)**

2. Inflasi merupakan masalah ekonomi yang dominan disamping masalah pengangguran yang sudah sejak lama dihadapi oleh masyarakat di seluruh dunia. **(Iswardono, 2004 : 49)**
3. Inflasi merupakan peristiwa moneter yang terjadi di semua negara yang dianggap sebagai penyakit ekonomi yang memerlukan penanganan khusus untuk menanggulangnya. **(Manurung, 2004 : 58)**

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian inflasi adalah naiknya harga-harga barang secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu dan diperlukan penanganan khusus untuk menanggulangnya.

2.2.6.2. Klasifikasi Inflasi

A. Jenis inflasi menurut sifatnya

Ada berbagai cara untuk menggolongkan macam inflasi atas dasar pernah atau tidaknya inflasi tersebut. Beberapa macam inflasi tersebut adalah :

1. Inflasi ringan, ditandai dengan laju inflasi yang rendah yaitu kurang dari 10% per tahun.
2. Inflasi menengah, ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar yaitu sampai 2 digit bahkan 3 digit. Dan kadang kala

berjalan dalam waktu yang relatif pendek. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang ringan.

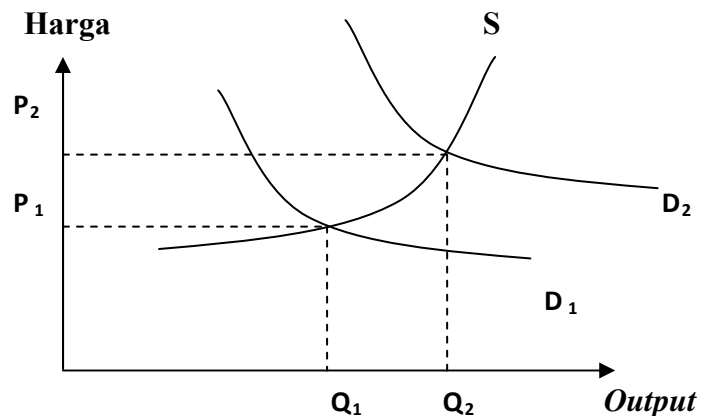
3. Inflasi tinggi merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai 5 atau 6 kali. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja.

B. Jenis inflasi menurut sebabnya

1. Demand pull inflation

Inflasi yang timbul karena adanya permintaan total akan berbagai barang terlalu kuat, sedangkan kondisi produksi telah berada pada kesempatan kerja penuh (*full employment*). Dalam keadaan ini kenaikan hasil produksi (*output*). Apabila kesempatan kerja penuh telah tercapai, penambahan permintaan selanjutnya hanyalah menaikkan harga saja. Proses terjadinya (*demand pull inflation*) dapat dijelaskan pada gambar sebagai berikut :

Gambar 1 : Kurva Demand Pull Inflation



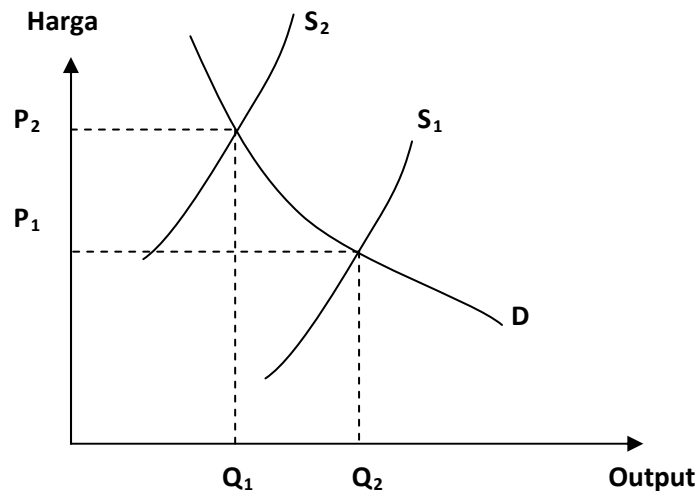
Sumber : Boediono, 2001. Ekonomi Makro, Penerbit BPFE, UGM, Yogyakarta, halaman 156

Kedua permintaan masyarakat akan barang-barang (*agregate*) bertambah (misal, karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan pencetakan uang atau kenaikan permintaan luar negeri akan barang-barang atau barang investasi swasta karena kredit yang murah), maka kurva *aggregate demand* bergeser dari D_1 ke D_2 akibatnya tingkat harga umum naik dari P_1 ke P_2 .

2. *Cost Push Inflation*

Inflasi yang disebabkan turunnya produksi, karena naiknya biaya produksi. Apabila proses ini berjalan terus menerus maka timbullah *cost push inflation*. proses terjadinya *cost push inflation* dapat di jelaskan pada gambar 2 sebagai berikut :

Gambar 2 : Kurva Cost Push Inflation



Sumber : Boediono, 2001. Ekonomi Makro, Penerbit BPFE, UGM, Yogyakarta, hal 157

Bila ongkos produksi naik dari P_1 ke P_2 (misalnya, karena kenaikan harga sarana produksi yang di datangkan dari luar negeri, atau karena kenaikan harga bahan bakar minyak) maka kurva penawaran masyarakat (agregat suplai) bergeser dari S_1 ke S_2 .

C. Jenis inflasi berdasarkan asalnya

Berdasarkan asalnya, inflasi dibedakan sebagai berikut; :

(Boediono, 2001 : 164)

1. Inflasi yang berasal yang dalam negeri (*Domestic Inflation*) adalah inflasi yang timbul karena adanya defisit anggaran belanja

yang dibiayai dengan percetakan uang baru, panen yang gagal dan sebagainya.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*Imported Inflation*) adalah inflasi yang timbul karena kenaikan harga langganan berdagang. Kenaikan harga barang-barang yang kita impor mengakibatkan kenaikan indeks biaya hidup, karena sebagian barang-barang yang tercakup didalamnya berasal dari impor selain itu juga secara tidak langsung akan menaikkan indeks harga melalui kenaikan biaya produksi dan kemudian harga jual dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah yang harus impor.

2.2.6.3. Akibat Inflasi

Inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor-faktor produksi serta produk nasional. Efek terhadap distribusi pendapatan disebut dengan *equity effect*. Sedangkan efek terhadap alokasi faktor-faktor produksi nasional masing-masing disebut dengan *efficiency* dan *output effects*.

Efek terhadap pendapatan (*Equity Effects*) sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan dengan adanya inflasi. Sebaliknya, pihak-pihak yang mendapatkan keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh

kenaikan pendapatan dengan persentase yang lebih besar dari laju inflasi.

Efek terhadap efisiensi (*Efficiency Effects*) yaitu inflasi dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Penambahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien.

Efek terhadap output (*output effects*) yaitu inflasi dapat menyebabkan adanya kenaikan produksi. Dengan alasan dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan usaha naik dan akan mendorong peningkatan produksi, namun jika laju inflasi terlalu tinggi maka akan mempunyai akibat sebaliknya yaitu penurunan output, dalam keadaan inflasi yang tinggi nilai uang riil turun, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian keadaan inflasi bisa diikuti dengan penurunan output.

2.2.6.4. Cara pengendalian inflasi.

Inflasi dapat terjadi karena besarnya uang beredar di masyarakat oleh karena itu mencegah lajunya inflasi adalah dengan pengendalian uang beredar di masyarakat tersebut dengan menggunakan kebijakan moneter, fiskal dan kebijakan yang berkaitan dengan produksi.

Sasaran kebijakan moneter dapat dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar, salah satu komponen jumlah uang beredar adalah uang giral. Bank sentral dapat mengatur jumlah uang giral ini melalui penetapan cadangan minimum. Untuk menekan laju inflasi cadangan minimum dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil.

Bank sentral dapat menggunakan suatu pengendalian yang disebut dengan tingkat diskonto untuk pinjaman yang diberikan oleh Bank sentral. Apabila tingkat diskonto dinaikkan oleh Bank sentral maka keinginan bank umum menjamin menjadi semakin kecil, sehingga cadangan yang ada di Bank sentral juga semakin kecil. Akibatnya kemampuan bank umum memberikan pinjaman pada masyarakat semakin kecil sehingga jumlah uang beredar turun dan inflasi dapat dicegah.

Kebijakan fiskal menyangkut peraturan tentang pengeluaran pemerintah serta perpajakan yang secara langsung dapat mempengaruhi permintaan total dengan demikian akan mempengaruhi harga. Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijaksanaan fiskal

yang berupa pengeluaran-pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

Kenaikan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijaksanaan penurunan biaya masuk sehingga impor barang meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung akan menurunkan harga.
(Nopirin, 2000 : 35)

2.2.7 Kurs Rupiah terhadap US \$

2.2.7.1. Pengertian Kurs Rupiah terhadap US \$

Kurs adalah pertukaran antara dua mata uang yang berbeda dan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut.
(Nopirin, 2000 : 163)

Kurs atau nilai tukar adalah jumlah atau harga mata uang domestik dari mata uang luar negeri (asing) atau rasio antara satu unit (satuan) mata uang dan jumlah mata uang yang lain pada waktu tertentu.
(Salvatore, 2004 : 140)

Kurs adalah nilai tukar suatu mata uang dengan mata uang Negara lainnya yang ditetapkan. (Sukirno, 2002 : 103)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurs merupakan perbandingan antara mata uang Negara satu dengan Negara lain yang didalamnya terdapat perbandingan nilai sehingga untuk mendapatkan maka harus menukarkan mata uang tersebut agar memperoleh satu unit mata uang asing.

Masih tingginya tekanan terhadap nilai tukar maka akan mengakibatkan tingginya suku bunga. Tingginya ketidakpastian dalam banyak aspek baik sosial, politik, maupun ekonomi telah banyak mempengaruhi perilaku dan ekspektasi para pelaku pasar valas terhadap kecenderungan melemahnya nilai tukar rupiah. Hal ini tercermin pada pergerakan premi or ward yang berada pada tingkat yang cukup tinggi. Kondisi tersebut tidak kondusif untuk menarik investor asing menanamkan modalnya di dalam negeri sehingga mengakibatkan suku bunga yang cukup tinggi.

Sifat kurs valuta asing sangat tergantung dari sifat pasar, apabila transaksi jual beli valas dapat dilakukan secara bebas, maka kurs valas akan berubah-ubah sesuai dengan perubahan permintaan dan penawaran. Apabila pemerintah menjalankan kebijaksanaan stabilisasi kurs, tetapi tidak dengan mempengaruhi transaksi swasta, maka kurs ini hanya akan berubah-ubah dalam batas yang kecil, meskipun batas-batas ini dapat diubah dari waktu ke waktu, pemerintahan yang dapat menguasai sepenuhnya transaksi valas. **(Nopirin, 2000 : 172)**

2.2.7.2 Sistem Kurs Valuta Asing

1. Sistem kurs tetap

Kurs tetap bukan merupakan kurs yang secara permanen abadi dan tetap, tetapi kurs lebih merupakan sistemnya yang diperkenalkan untuk berfluktuasi dalam batas sempit yang mengelilingi nilai prioritas dimana keduanya tetap berdiri dan kekal.

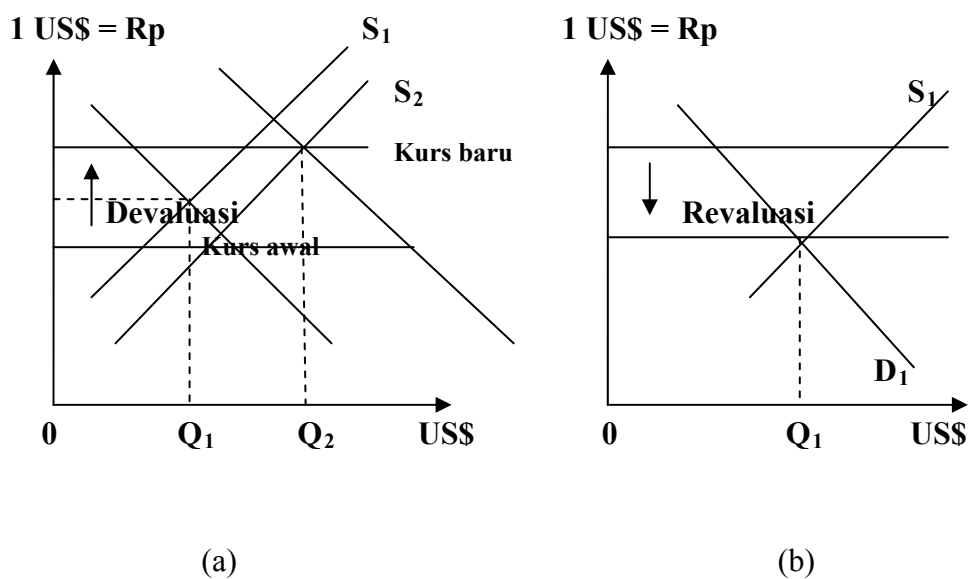
(Suparmoko, 2000 : 370)

Dalam sistem kurs tetap, kurs ditetapkan berdasarkan keputusan pemerintah. Kelebihan dari sistem ini adalah adanya kepastian nilai tukar yang dapat meningkatkan ekspektasi. Tetapi kelemahannya adalah kurs yang berlaku tidak selalu menggambarkan tingkat kelangkaan yang sebenarnya. Bisa terjadi nilai tukar yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi dibandingkan dengan kurs pasar (*overvalued*). Atau sebaliknya, nilai tukar yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah dibanding dengan kurs pasar (*undervalued*). Bila selisih kurs yang ditetapkan dianggap terlalu jauh, maka pemerintah melakukan koreksi. Koreksi atas nilai tukar yang dinilai terlalu tinggi disebut devaluasi (*devaluation*), sedangkan koreksi untuk nilai tukar yang dinilai terlalu rendah disebut revaluasi (*revaluation*). Jadi revaluasi dan devaluasi pada prinsipnya juga merupakan koreksi atas nilai tukar, seperti halnya dengan apresiasi

dan depresiasi berdasarkan mekanisme pasar. Kondisi-kondisi yang dimaksud dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva sebagai berikut : (Manurung, 2004 : 76)

Gambar 3:

Penentuan Nilai Tukar Dalam Sistem Kurs Tetap



(a) Nilai Rupiah Menguat

(b) Nilai Rupiah Melemah

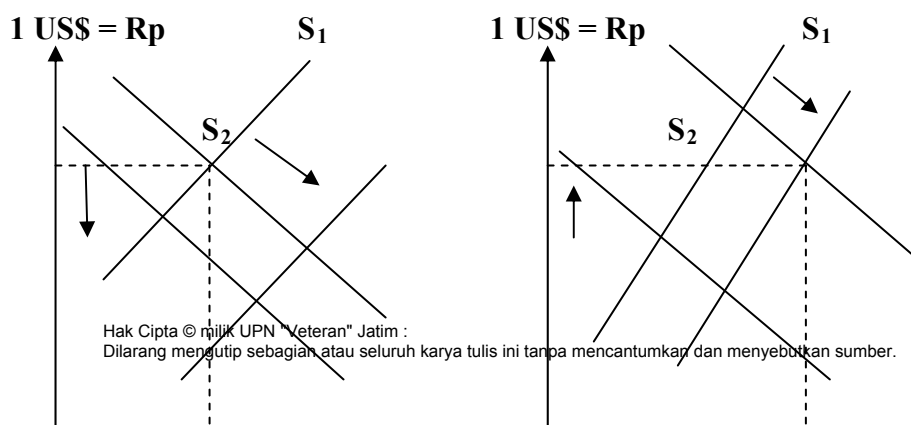
Sumber : Manurung, Mandala, 2004, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (kajian Konstektual Indonesia), Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, halaman 76.

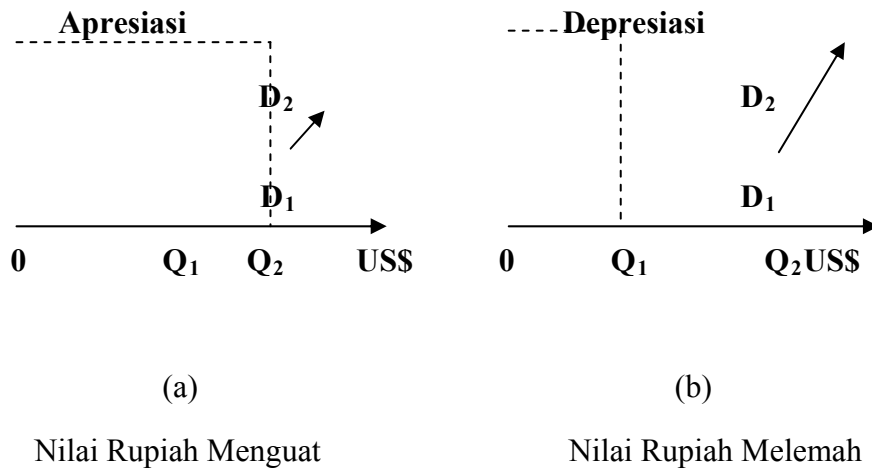
2. Sistem kurs mengambang.

Karakteristik dalam sistem kurs mengambang yaitu berfluktuasi dengan bebas sebagai reaksi perubahan permintaan dan penawaran valuta asing. Sistem kurs mengambang tercipta pada tahun 1973. sistem kurs ini merupakan sistem kurs yang paling sederhana dan sesuai dengan modal persaingan kompetitif, dimana terdapat campur tangan pemerintah untuk mendukung kurs sehingga kurs bebas bereaksi terhadap perubahan kondisi pasar dan juga faktor-faktor yang mendasari permintaan dan penawaran valuta asing. Implikasinya adalah bahwa sistem kurs mengambang akan lebih berfluktuasi daripada sistem kurs tetap. (Suparmoko, 2000 : 370)

Bila pertumbuhan permintaan lebih cepat dari pertumbuhan penawarannya maka mata uang tersebut akan semakin mahal (mengalami apresiasi). Bila nilai tukarnya melemah, atau mengalami depresiasi, maka artinya pertumbuhan permintaan lebih lambat dari pertumbuhan penawaran. Secara sederhana dapat ditunjukkan dalam kurva sebagai berikut

Gambar 4 :
Penentuan Nilai Tukar Dalam Sistem Kurs Mengambang





Sumber : Manurung, Mandala, 2004, Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (kajian Konstektual Indonesia), Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, halaman 74.

3. Sistem kurs mengambang terkendali.

Sistem kurs mengambang terkendali (*managed floating system*) adalah sebuah sistem dimana penguasaan moneter campur tangan dalam pasar mata uang asing untuk memerlukan fluktuasi jangka pendek atau tanpa mempengaruhi arah jangka panjang dalam nilai tukar. (Manurung, 2004 : 74)

2.2.7.3 Faktor–Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Nilai Tukar Mata Uang.

Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi nilai mata uang antara mata uang satu dengan mata uang lainnya atau negara lain :
(Manurung, 2004 : 75-76)

1. Tingkat Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dimana senantiasa terjadi peningkatan harga-harga secara umum, atau suatu keadaan dimana senantiasa terjadi penurunan nilai mata uang, karena semakin meningkatnya jumlah uang, karena semakin meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat.

2. Tingkat Bunga

Apabila tingkat bunga dalam negeri lebih tinggi dari tingkat bunga luar negeri akan mengakibatkan aktiva dalam negeri lebih menarik bagi penanam modal dari dalam maupun luar negeri, sehingga akan menyebabkan terjadinya pemasukan modal yang cenderung menimbulkan apresiasi dalam nilai tukar mata uang dalam negeri.

3. Tingkat Pendapatan

Bila pendapatan riil masyarakat dalam negeri meningkat, maka permintaan akan barang–barang impor akan meningkat, yang berarti peningkatan permintaan valuta asing. hal ini akan mengakibatkan

nilai tukar mata uang asing mengalami peningkatan, dan mata uang dalam negeri akan mengalami depresiasi.

4. Faktor Spekulasi

Spekulasi adalah kegiatan membeli atau menjual mata uang asing dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penurunan atau peningkatan dalam nilai mata uang dalam negeri.

2.2.7.4 Sistem Kurs yang Berubah–ubah

Didalam pasar bebas perubahan kurs tergantung pada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran valuta asing. Permintaan valuta asing diperlukan guna melakukan transaksi pembayaran keluar negeri (impor). permintaan valuta asing di tentukan dari transaksi debit dalam neraca. pembayaran internasional, sedangkan penawaran valuta asing berasal dari eksportir, yakni berasal dari transaksi kredit neraca pembayaran internasional. suatu mata uang dikatakan kuat apabila transaksi autonomus debit (surplus neraca pembayaran) sebaliknya di katakan lemah apabila neraca pembayarannya mengalami defisit.

2.2.7.5 Sistem Kurs yang Stabil

Sistem kurs bebas sering menimbulkan adanya tindakan spekulasi sebagai akibat ketidakpastian di dalam kurs valuta asing, oleh karena itu

1. Aktif : pemerintah menyediakan dana untuk tujuan stabilitas kurs.
2. Pasif : suatu negara yang menggunakan sistem standar emas.

2.2.7.6 Perubahan–Perubahan Kurs Valuta Asing

Apabila kurs valuta asing sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar maka kurs tersebut akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Beberapa faktor yang mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan dalam kurs pertukaran : (Salvator, 2004 : 74)

1. Perubahan dalam citarasa masyarakat.

Perubahan ini mempengaruhi permintaan. Apabila penduduk suatu negara semakin lebih menyukai barang–barang dari suatu negara lain, maka permintaan ke atas mata uang negara lain tersebut bertambah. Maka perubahan seperti itu mempengaruhi kecenderungan untuk menaikkan nilai mata uang negara lain tersebut.

2. Perubahan harga dari barang–barang ekspor.

Apabila barang–barang ekspor mengalami perubahan maka perubahan ini akan mempengaruhi permintaan ke atas barang ekspor itu. perubahan ini akan mempengaruhi kurs valuta asing. Kenaikan harga

barang-barang ekspor akan mengurangi permintaan ke atas barang tersebut di luar negeri. maka kenaikan tersebut akan mengurangi penawaran mata uang asing.

3. Kenaikan harga-harga umum (inflasi).

Berlakunya keadaan demikian di suatu negara dapat menurunkan nilai mata uangnya. disatu pihak kenaikan harga-harga itu akan menyebabkan penduduk negara itu semakin banyak mengimpor dari negara lain. Oleh karenanya permintaan atas valuta asing bertambah mahal dan ini akan mengurangi permintaannya dan selanjutnya akan menurunkan penawaran valuta asing.

4. Perubahan dalam tingkat bunga dan tingkat pengembalian Investasi.

Disamping dipengaruhi oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran ke atas barang-barang yang diperdagangkan diantara berbagai negara, kurs valuta asing dipengaruhi pula oleh aliran modal jangka panjang dan jangka pendek. tingkat bunga dan tingkat pengembalian investasi sangat mempengaruhi jumlah serta aliran modal jangka panjang dan jangka pendek. Tingkat pendapatan investasi yang lebih menarik akan mendorong pemasukan modal ke negara tersebut.

5. Perkembangan ekonomi

Bentuk dari pengaruh perkembangan ekonomi kepada kurs valuta asing tergantung kepada corak dari perkembangan ekonomi. Semakin membaiknya perekonomian di suatu negara, berarti kurs dalam negeri akan menguat. Dengan menguatnya nilai tukar mata uang domestik, maka nilai tukar valuta asing akan rendah.

2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dari penelitian ini membahas “Analisis Pengaruh Makro Ekonomi Terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Bank Umum dan Bank Syariah”, dalam pembahasan ini variabel yang mempengaruhi yaitu inflasi, kurs Rupiah terhadap US \$, dan suku bunga SBI. Untuk mengetahui keterkaitan hubungan antar variabel maka dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut :

1. Inflasi (X_1)

Inflasi adalah kenaikan harga-harga umum secara terus-menerus. (Putong, 2003 : 254). Dengan menurunnya inflasi maka harga-harga barang akan tergolong murah. Untuk memproduksi suatu barang akan cenderung lebih rendah nilainya sehingga dengan biaya produksi yang rendah maka keuntungan yang diperoleh dari omset penjualan juga semakin besar. Hal ini akan berakibat pada peningkatan produktivitas barang dan jasa sehingga jumlah tenaga kerja yang diserap meningkat,

yang akan diikuti oleh meningkatnya pendapatan riil. Dengan meningkatnya pendapatan riil, keinginan masyarakat untuk menyimpan sebagian pendapatannya pada bank, baik bank umum maupun bank syariah akan meningkat pula. Sebaliknya, jika inflasi mengalami kenaikan, maka harga barang-barang akan mengalami kenaikan, yang berdampak pada menurunnya produktivitas. Dari hal tersebut berhubungan dengan pendapatan riil masyarakat yang juga akan menurun. **(Rivai, 2006 : 32)**

2. Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2)

Kurs adalah jumlah atau harga mata uang domestik dari mata uang luar negeri (asing) atau rasio antara satu unit satuan mata uang dengan jumlah mata uang yang lain pada waktu tertentu. **(Salvatore, 2004 : 140)** Dalam penelitian ini kurs Rupiah terhadap US \$ akan mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Jika nilai tukar mata uang US \$ rendah maka harga-harga barang dalam negeri akan stabil, yang berakibat baik pada perekonomian dalam negeri, dan itu berarti kurs Rupiah terhadap US \$ menguat. Hal tersebut akan berdampak pada simpanan masyarakat pada bank umum maupun syariah yang juga akan meningkat. **(Rivai, 2006 : 34)**

3. Suku Bunga SBI (X_3)

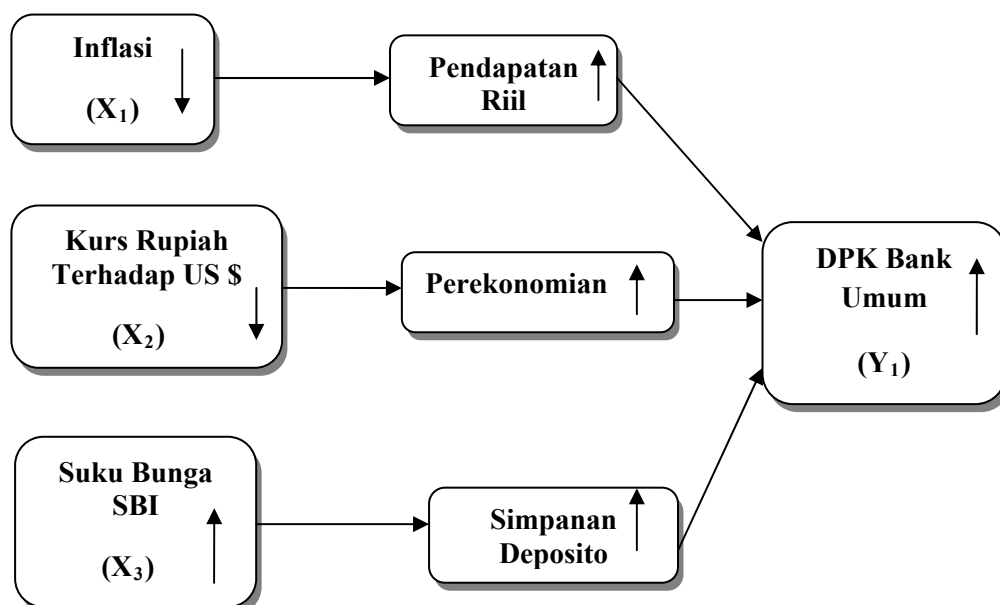
Suku bunga adalah tingkat balas jasa yang diperoleh masyarakat yang menginvestasikan dananya pada pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). **(Manurung, 2004 : 112)**

Apabila tingkat suku bunga SBI naik, maka suku bunga yang diberikan oleh bank juga akan mengalami kenaikan. Kecenderungan masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank akan meningkat, khususnya pada simpanan deposito bank umum. Tetapi berbeda dengan simpanan pada bank syariah yang akan menurun karena dampak dari meningkatnya simpanan pada bank umum tersebut. Jika tingkat suku bunga SBI yang diberikan rendah, maka masyarakat akan cenderung untuk menginvestasikan dananya pada bidang lain selain perbankan. **(Iqbal, 2001 : 33)**

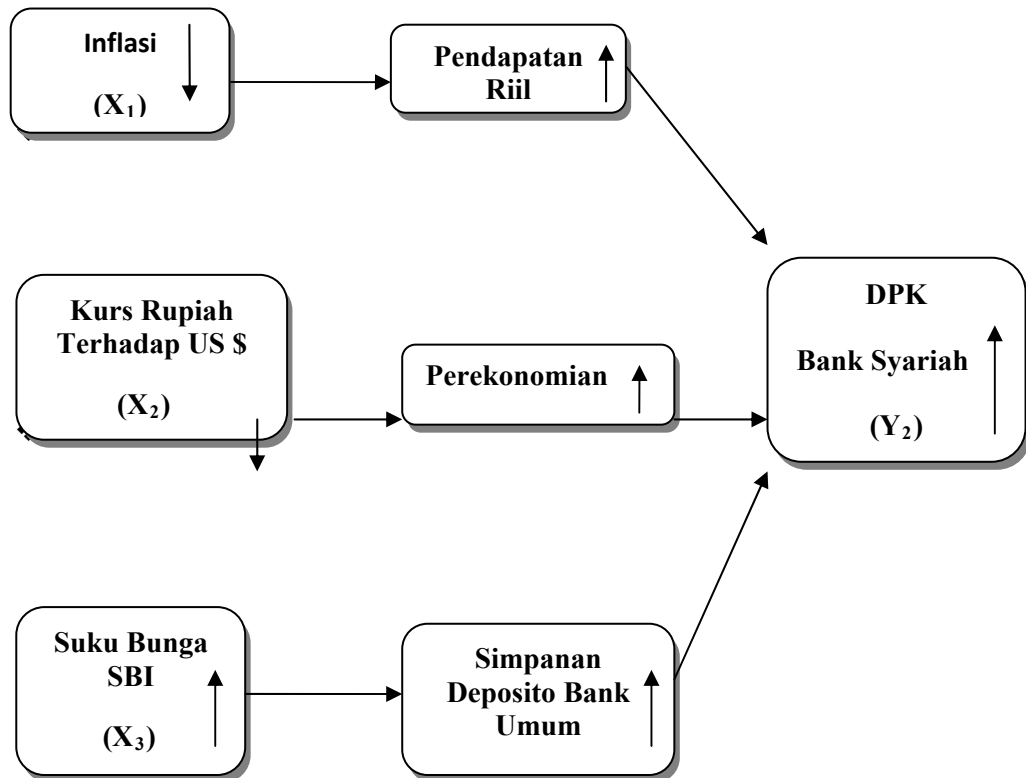
Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan sebelumnya dan teori-teori yang melandasinya, maka dapat ditarik suatu kerangka pikir untuk memecahkan masalah tersebut seperti pada gambar berikut **(Rivai, 2006 : 35)**

Gambar 5 : Kerangka Pikir

❖ **Bank Umum**



❖ Bank Syariah



2.4. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih belum teruji kebenarannya dan masih harus dibuktikan secara empiris berdasarkan fakta-fakta yang ada. Hipotesis akan ditolak jika memang salah atau diterima jika fakta-fakta membenarkan. Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka dapat dirumuskan hipotesis yang merupakan

kesimpulan sementara terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Diduga tingkat inflasi, kurs Rupiah terhadap US \$, dan tingkat suku bunga SBI mempunyai pengaruh yang nyata terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK) pada bank umum dan bank syariah.
2. Diduga dari ketiga faktor makro ekonomi tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap jumlah dana pihak ketiga (DPK) pada bank umum dan bank syariah adalah inflasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel adalah pernyataan tentang definisi dan pengukuran variabel “penelitian secara operasional berdasarkan teori yang ada maupun pengalaman empiris.”

Sedangkan definisi pengukuran variabel yang digunakan dalam penulisan penelitian ini, antara lain terdiri dari :

a. Variabel terikat (*Dependent Variable*) :

1. Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Umum (Y_1)

Yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah besarnya dana masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank umum dalam bentuk giro, deposito, tabungan. Dalam variabel ini dinyatakan dalam Miliar Rupiah.

2. Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Syariah (Y_2)

Yang dimaksud dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dititipkan oleh masyarakat atau pihak ketiga kepada bank syariah. Variabel ini dinyatakan dalam Miliar Rupiah.

b. Variabel bebas (*Independent variable*) terdiri dari :

1. Inflasi (X_1)

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara terus menerus, laju inflasi ditentukan oleh penambahan

jumlah uang beredar dan mengenai kenaikan harga-harga dimasa mendatang. Dalam penelitian ini inflasi dinyatakan dalam bentuk persen.

2. Kurs Rupiah terhadap US \$ (X_2)

Kurs atau nilai tukar Rupiah terhadap US \$ adalah jumlah atau harga mata uang Rupiah dari mata uang US \$ pada waktu tertentu. Dalam penelitian ini kurs Rupiah terhadap US \$ dinyatakan dalam bentuk Rupiah.

3. Suku Bunga SBI (X_3)

Tingkat balas jasa yang diperoleh masyarakat penyimpan dana di bank karena menyimpan sejumlah dana yang dimilikinya. Dalam penelitian ini suku bunga SBI dinyatakan dalam bentuk persen.

3.2. Teknik Penentuan Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah secara time series, yaitu data berkala dalam periode triwulan selama tiga tahun dari tahun 2006 sampai dengan 2008.

3.3. Jenis dan Sumber Data

3.3.1. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang bisa dikumpulkan atau diperoleh dari instansi

yang ada hubungannya dengan penelitian ini atau data yang sudah terlampir dan bisa diambil dari instansi yang bersangkutan.

3.3.2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a. Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur
- b. Bank Indonesia cabang Surabaya

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan pada penelitian ini dilakukan dengan :

- a. Study kepustakaan (*Library Research*)

Data yang diperoleh berdasarkan buku-buku atau literatur-literatur yang sesuai dengan usaha penelitian ini.

- b. Studi Lapangan

Yaitu memperoleh data dan melakukan penelitian di lapangan untuk mendapatkan data yang di peroleh dalam penulisan skripsi ini, dilakukan dengan cara mengambil data statistik dari laporan – laporan

dari instansi atau lembaga yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

3.5. Teknik Analisis dan Uji Hipotesis

3.5.1. Teknik Analisis

Sesuai dengan tujuan dari usulan penelitian ini, maka digunakan suatu model regresi linier berganda. Analisis regresi merupakan alat analisis yang berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Bentuk model tersebut adalah :

$$Y_1 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu_i \dots \dots (\text{Soelistyo, 2001 : 320})$$

$$Y_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \mu_i \dots \dots (\text{Soelistyo, 2001 : 320})$$

Dimana :

Y_1 = dana pihak ketiga bank umum

Y_2 = dana pihak ketiga bank syariah

X_1 = tingkat suku bunga SBI

X_2 = tingkat inflasi

X_3 = kurs Rupiah terhadap US \$

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi

μ_i = Variabel pengganggu, merupakan wakil dari semua faktor lain yang dapat mempengaruhi Dana Pihak Ketiga (DPK), namun tidak dimasukkan dalam model karena diasumsikan sama dengan nol.

Sedangkan untuk mengetahui model analisis tersebut cukup layak digunakan dalam pembuktian selanjutnya dan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat, maka perlu diketahui nilai-nilai koefisien determinasi dengan menggunakan rumus :

$$R^2 = \frac{\text{JK regresi}}{\text{JK total}} \dots\dots\dots(\text{Soelistyo, 2001 : 325})$$

Dimana :

R^2 = Koefisien determinasi

JK = Jumlah kuadrat

JK Regresi = $b_1 \sum y_i X_1 + b_2 \sum y_i X_2 + b_3 \sum y_i X_3 + \dots\dots b_n \sum y_i X_n$

JK total = $\sum y_i^2$ atau $\frac{\sum y_i - (\sum y)^2}{n}$

Jadi :

$$R^2 = \frac{b_1 \sum y_i X_1 + b_2 \sum y_i X_2 + b_3 \sum y_i X_3}{\sum y_i^2} \dots\dots\dots(\text{Soelistyo, 2001 : 325})$$

Karakteristik utama dari R^2 adalah :

1. Tidak mempunyai nilai negatif
2. Nilainya terletak antara 0 dan 1. Dimana kecocokan model dikatakan “lebih baik” jika R^2 semakin dekat dengan 1.
3. Salah satu sifat penting dari R^2 adalah bahwa nilai tadi merupakan fungsi yang tidak pernah menurun (*noncreasing function*) dari banyaknya variabel yang menjelaskan yang ada dalam model seiring dengan meningkatnya jumlah variabel yang menjelaskan, R^2 hampir-hampir selalu meningkat dan tak pernah menurun.
(Soelistyo, 2001 : 325)

3.5.2. Uji Hipotesis

Selanjutnya untuk menguji hipotesisnya menggunakan cara sebagai berikut :

a. Uji F (secara simultan)

Untuk menguji hubungan regresi antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y), maka digunakan uji F.

Pengujian ini ditentukan dengan rumus :

$$F_{\text{hitung}} = \frac{\text{KT regresi}}{\text{KT Galat (Soelistyo, 2001 : 325)}}$$

Dengan derajat bebas = (k, n-k-1)

Keterangan :

K = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah sampel

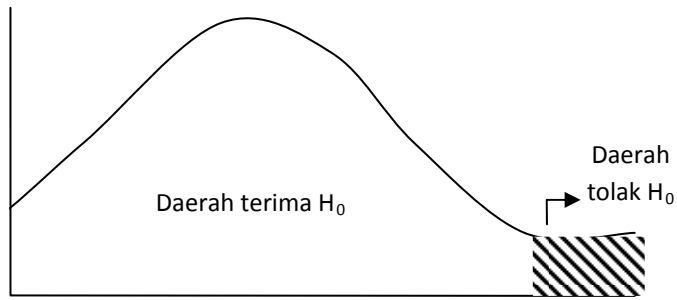
KT = Kuadrat tengah

Galat = Error (Residual)

Kriteria uji F akan ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

Gambar 6

Kurva Uji Hipotesis Secara Simultan



**Sumber : Soelistyo, 2001, “Dasar-Dasar Ekonometrika”, BPFE
UGM, Yogyakarta, Halaman 325.**

$H_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$ (tidak ada pengaruh)

$H_0 = \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$ (ada pengaruh)

Kaidah keputusannya adalah :

Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima

Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak

b. Uji t

Digunakan untuk menguji hubungan regresi secara terpisah dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya dengan persamaan sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)} \dots\dots\dots(\text{Soelistyo, 2001 : 328})$$

Derajat bebas = $(n-k-1)$

Dimana :

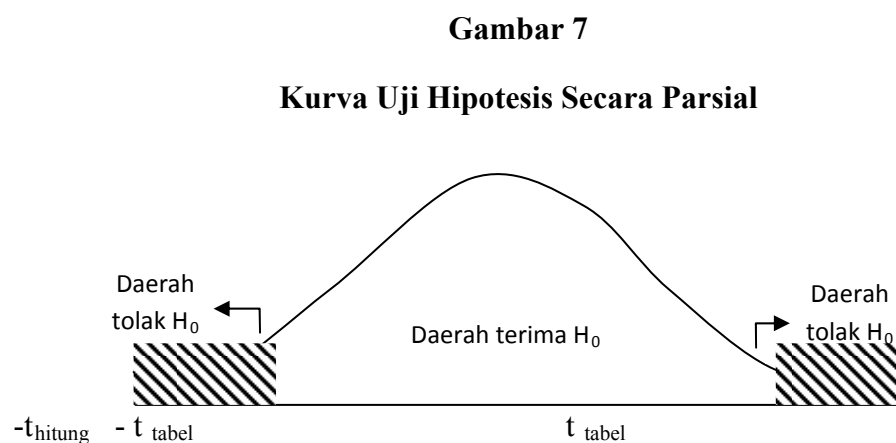
β_i = Koefisien regresi

Se = Standar error

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel bebas

Kriteria uji t akan ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :



**Sumber : Soelistyo, 2001, “Dasar-Dasar Ekonometrika”, BPFE
UGM, Yogyakarta, Halaman 328.**

$H_0 : \beta_i = 0$ (tidak ada pengaruh nyata)

$H_i : \beta_i \neq 0$ (ada pengaruh nyata)

Kaidah keputusannya adalah :

1. H_0 diterima jika $-t_{hitung} \leq t_{tabel}$, berarti tidak ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.
2. H_0 ditolak jika $-t_{tabel} < t_{hitung} > t_{tabel}$, berarti ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat.

3.6. Uji Asumsi` Klasik (BLUE)

Persamaan regresi yang dipergunakan haruslah bersifat BLUE, yang artinya pengambilan melalui uji F atau uji t tidak boleh bias. Untuk melaksanakan operasi linier tersebut diperlukan 3 (tiga) asumsi dasar yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar, yaitu :

1. Tidak terjadi korelasi
2. Tidak terjadi multikolinieritas
3. Tidak terjadi heteroskedastisitas

Apabila ada salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). sehingga pengambilan keputusan melalui uji F dan uji t menjadi bias. Sifat dari BLUE itu sendiri adalah :

- a. *Best* : Pentingnya sifat ini bila diterapkan dalam uji signifikan data terhadap α dan β serta membuat interval keyakinan taksiran-taksiran.

- b. *Linier* : Sifat ini dibutuhkan untuk memudahkan dalam penafsiran.
- c. *Unbiased* : Nilai jumlah sampel sangat besar penaksir parameter diperoleh dari sampel besar kira-kira lebih mendekati nilai parameter sebenarnya.
- d. *Estimate* : e (kesalahan) penaksiran linier kuadrat terkecil, artinya diharapkan sekecil mungkin.

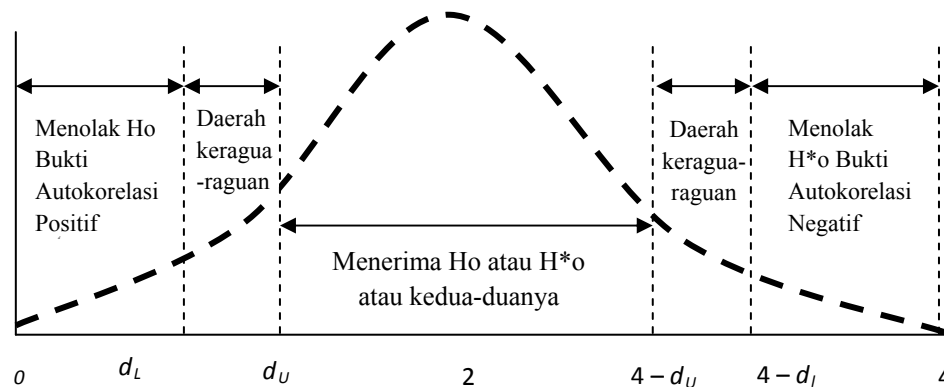
Tiga dari asumsi dasar tersebut yang tidak boleh dilanggar dalam regresi linier berganda :

1. Autokorelasi

Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai “korelasi antara data observasi yang diurutkan berdasarkan urut waktu (*data time series*) atau data yang diambil pada waktu tertentu (*data cross-sectional*). Jadi, dalam model regresi linier diasumsikan tidak terdapat gejala autokorelasi. Artinya, nilai residual (Y observasi – Y prediksi) pada waktu ke- t (e_t) tidak boleh ada hubungan dengan nilai residual periode sebelumnya (e_{t-1}). (Soelistyo, 2001 : 332)

Identifikasi gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan kurva dibawah ini :

Gambar 8: Kurva Durbin-Watson



Sumber : Soelistyo, 2001, “Dasar-Dasar Ekonometrika”, BPFE UGM, Yogyakarta, Halaman 332.

Adanya autokorelasi didasarkan atas :

1. Daerah A: Durbin Watson $< d_L$, tolak H_0 autokorelasi positif.
2. Daerah B : $d_L < \text{Durbin Watson} < d_U$, ragu-ragu.
3. Daerah C : $d_U < \text{Durbin Watson} < 4 - d_U$, terima H_0 , non autokorelasi.
4. Daerah D : $4 - d_U < \text{Durbin Watson} < 4 - d_L$, ragu-ragu.
5. Daerah E: Durbin Watson $< 4 - d_L$, tolak H_0 autokorelasi negatif.

Pendeteksian adanya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan perhitungan besaran Durbin Watson. Panduan mengenai angka D – W (Durbin Watson) untuk mendeteksi autokorelasi adalah:

1. Angka D – W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif.
2. Angka D – W dibawah -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.
3. Angka D – W diatas +2, berarti ada korelasi negatif.

Tabel 1 : Autokorelasi Durbin Watson

Durbin Watson	Kesimpulan
Kurang dari 1,08	Ada autokorelasi
1,08 – 1,66	Tanpa kesimpulan
1,66 – 2,34	Tidak ada autokorelasi
2,34 – 2,92	Tanpa kesimpulan
Lebih dari 2,92	Ada autokorelasi

Sumber : Algifari, 2000. Analisis Regresi, Teori, Kasus dan Solusi, Penerbit : BPFE UGM, Yogyakarta, Halaman 89.

2. Multikolinieritas

Persamaan regresi linier berganda diatas diasumsikan tidak terjadi pengaruh antar variabel bebas. Apabila ternyata ada pengaruh linier antar variabel bebas, maka asumsi tersebut tidak berlaku lagi (terjadi bias).

Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas dapat dilihat ciri-cirinya sebagai berikut :

- a. Koefisien determinasi berganda (R square) tinggi

- b. Koefisien korelasi sederhana tinggi
- c. Nilai F_{hitung} tinggi (signifikan)
- d. Tapi tak satupun (atau sedikit sekali) diantara variabel bebas yang signifikan.

Akibat adanya multikolinieritas adalah :

1. Nilai standar error (galat baku) tinggi, sehingga taraf kepercayaan (*confidence intervalnya*) akan semakin melebar. Dengan demikian, pengujian terhadap koefisien regresi secara individu menjadi tidak signifikan.
2. Probabilitas untuk menerima hipotesa H_0 diterima (tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat) akan semakin besar.

Identifikasi secara statistik atau tidaknya gejala multikolinier dapat dilakukan dengan menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF).

$$VIF = \frac{1}{\text{tolerance}}$$

VIF menyatakan tingkat “pembengkakan” varians. Apabila VIF lebih besar dari 10, hal ini berarti terdapat multikolinier pada persamaan regresi linier. (Soelistyo, 2001 : 335)

3. Heteroskedastisitas

Pada regresi linier residual tidak boleh ada hubungan dengan variabel X. Hal ini bisa diidentifikasi dengan cara menghitung korelasi *Rank Spearman* antara residual dengan seluruh variabel bebas. Rumus *Rank Spearman* adalah :

$$\left| \frac{\sum d_i^2}{N(N^2 - 1)} \right| \dots\dots\dots (\text{Soelistyo, 2001 : 334})$$

Keterangan :

D_i = Perbedaan dalam Rank antara residual dengan variabel bebas ke-1

N = Banyaknya data